



# PANCASILA, TRANSNACIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA

**Editor:**

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M

Mirza Satria Buana S.H., M.H, Ph.D



**The Centre for Human Rights  
Multiculturalism and Migration**

*University of Jember, Indonesia*

PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA  
Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana (editor)  
@CHRM2 UNEJ, LKIS, 2018

xii + 270 halaman: 15,5 x 23 cm

1. Pancasila 2. Transnasionalisme 3. Kedaulatan Negara

ISBN: 978-602-6610-67-6

Editor: Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana

Penyelaras Bahasa: Sonia Candra Dewi

Perwajahan Sampul/Buku: Noril Camelia

Setting/Layout: Noril Camelia dan Ayu Megawati

Penerbit & Distribusi:

**LKIS**

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: [lkis@lkis.co.id](mailto:lkis@lkis.co.id)

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2018

Percetakan:

**LKIS**

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: [lkis.printing@yahoo.com](mailto:lkis.printing@yahoo.com)

## DAFTAR ISI

Pengantar Editor → v

Daftar Isi → ix

### BAB I PANCASILA, KOSMOPOLITANISME DAN TRANSNASIONALISME → 1

Sila Persatuan Indonesia dalam Miskonsepsi Identitas Geokultural: Perspektif Hubungan Antarneegara → 1  
Baiq Wardhani

Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Historis → 17  
Abubakar Eby Hara

Pancasila sebagai Instrumen Penekan Transnasionalisme Ekonomi dan Hukum Internasional → 45  
Mirza Satria Buana

### BAB II PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME DALAM ARUS IDEOLOGI TRANSNASIONAL → 63

Revitalisasi Pancasila Di tengah Arus Globalisasi → 65  
Mahathir Muhammad Iqbal

Antara Transnasionalisme Wahhabi, Pancasila dan Kedaulatan Negara → 79  
Nurrudin Al Akbar

Problematika Multikultural Dan Konstruksi Pancasila → 127  
Moh. Irmawan Jauhari

# Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Historis

Abubakar Eby Hara

## Pendahuluan

Nasionalisme adalah konsep yang lahir dari negara-negara Barat. Seperti juga konsep negara, konsep nasionalisme dirumuskan berdasarkan pengalaman negara-negara Barat. Dalam paper ini, konsep-konsep ini akan disesuaikan dengan pengalaman di dunia ketiga yang berbeda dari pengalaman Barat. Tidak ada definisi yang *fit* tentang nasionalisme. Definisi nasionalisme yang umum biasanya berkaitan dengan loyalitas dan kecintaan pada bangsa lebih daripada kecintaan pada bangsa ataupun lembaga internasional lainnya. Definisi demikian sering disamakan dengan patriotisme. Nasionalisme bahkan sering dianggap penyebab perang.<sup>1</sup> Nasionalisme juga berkaitan dengan kedaulatan, dengan hak mengatur diri sendiri, dan dengan identitas nasional yang dilandaskan pada ciri-ciri bersama seperti budaya, bahasa, ras, agama, tujuan politik dan keturunan yang sama.<sup>2</sup> Semua unsur ini dalam level yang berbeda memang berkaitan dengan nasionalisme. Dalam paper ini, karena itu elemen-elemen ini dianggap sebagai ciri-ciri dan sifat nasionalisme.

Dari berbagai tulisan, para pakar nasionalisme memang membedakan dua aspek nasionalisme. Aspek pertama adalah ciri-ciri atau sifat nasionalisme, sedangkan aspek kedua adalah tentang pengelolaan ciri-ciri tersebut oleh elit dan tokoh-tokoh nasionalis baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dalam paper ini kedua aspek ini dipandang saling melengkapi untuk memahami perkembangan nasionalisme di Indonesia.

<sup>1</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nationalism>

<sup>2</sup> Anna Triandafyllidou, 'National identity and the other', *Ethnic and Racial Studies*, 21 (4), 1998; A.D. Smith, *The Ethnic Revival in the Modern World* (Cambridge University Press, 1981).

Berkaitan dengan sifat dan ciri nasionalisme dalam definisi di atas, para pakar mengelompokkannya dalam dua konsep utama yaitu *civic nationalism* dan *ethnic* atau *tribal nationalism*.<sup>5</sup> Sifat utama dari *civic nationalism* adalah inklusif dan terbuka untuk semua elemen masyarakat. Nasionalisme demikian juga dilihat bersesuaian dengan nilai-nilai liberalisme seperti kebebasan, toleransi, kesederazaman dan hak-hak individu. Para pendukungnya, menyebutkan pentingnya identitas nasional karena identitas demikian memberi makna bagi kehidupan yang otonom dan bermakna. Masyarakat demokrasi juga membutuhkan identitas nasional agar berfungsi dengan baik.<sup>6</sup>

Nasionalisme etnik selain berangkat dari kesamaan etnis, bisa juga berangkat dari bahasa, kebiasaan dan tradisi, dan agama. Dalam nasionalisme jenis ini seringkali bangsa sudah ada terlebih dahulu baru kemudian negara tercapa. Pecahan-pecahan Uni Soviet dan Yugoslavia yang kemudian menjadi beberapa negara kecil menunjukkan model negara yang tercapa dari bangsa-bangsa yang memiliki kesamaan etnis yang sudah ada sebelumnya. Ini misalnya dapat dilihat dari negara-negara seperti Serbia, Bosnia dan Montenegro dari bekas Yugoslavia, Armenia, Kazakhstan dan Uzbekistan untuk menyebut beberapa contoh pecahan Soviet. Nasionalisme jenis ini memiliki kesamaan emosional yang kuat yang menjadi landasan bagi terbentuknya negara.

Dalam perkembangannya, nasionalisme jenis terakhir ini juga sering dibagi menjadi apa yang dikenal dengan nasionalisme sekuler dan religius.<sup>7</sup> Nasionalisme sekuler sering dihubungkan dengan kelompok-kelompok non-agama terutama Islam yang punya pandangan kebangsaan berbeda dengan kelompok yang mengaitkan nasionalisme dengan religiusitas. Nasionalisme Indonesia belakangan juga sering dicopot dari sisi asal usul etnisnya. Beberapa pendukung separatisme misalnya mempertanyakan kesatuan-integrasi wilayah seperti Timor Timur, Aceh dan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mereka melihat secara etnis dan agama, yang dilupakan dengan

permasalah Timor Timur, daerah-daerah itu tidak *legitimate* untuk menjadi wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya, realitas pembentukan negara-negara tentu tidak sesederhana kedua konsep besar di atas. Bangsa-bangsa dengan etnis dan agama yang sama belum tentu berhasil menjadi satu negara. Bangsa Arab adalah contoh yang nyata, dimana di situ ada satu bangsa tetapi terdapat banyak negara. Demikian juga sebaliknya, negara yang berbeda bangsa bisa melahirkan suatu negara. Negara-negara bekas penjajahan umumnya mengalami nasib yang seperti ini. India, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan Singapore adalah negara *multi-cultural* dan *multi-religious* tetapi bisa membentuk sebuah negara yang sama.

Melihat kenyataan ini, konsep *ethnic* dan *civic nationalism* mempunyai keterbatasan. Kedua konsep ini dapat mengelakan sumber-sumber dan sifat nasionalisme. Namun perkembangan nasionalisme ini sedikit selinggi terbentuk negara memerlukan analisis lain. Teoritis nasionalisme seperti Benedict Anderson, misalnya mencoba mengisi gap ini. Ia menguraikan lahirnya nasionalisme Indonesia sejalan dengan perkembangan kapitalisme terutama media cetak. Anderson melihat pentingnya peran elit dan pejuang-pemimpin konsep yang disebut dengan *imagined community* untuk menjelaskan menguatnya perasaan nasionalisme dan kebangsaan yang melekat pada anak bangsa Indonesia.

Salah satu kritik yang umum terhadap konsep-konsep di atas adalah bahwa pengalaman Barat sangat dominan dalam memahami nasionalisme. Di Barat memang kebanyakan nasionalisme berbasis dari unsur etnisitas dan agama. Maka dari itu penulis seperti Anthony Smith dan John Hutchinson mengatakan pentingnya perasaan etnisitas dalam pembentukan bangsa. Perasaan kesamaan etnis dan juga agama dianggap modal dasar bagi terbentuknya suatu bangsa. Beberapa wilayah bekas Eropa Timur dan Uni Soviet, semuanya hampir mengikuti alir kesamaan etnis dan agama. Ini misalnya dimulai dari Ceko dan Slowakia, di Yugoslavia ada Bosnia dan Serbia, kemudian di bekas Uni Soviet ada Ukraina, Belarusia, Uzbekistan, Azerbaijan yang kesemuanya mengikuti alir kesamaan etnis dan atau agama.

Dalam keadaan demikian, *civic nationalism* yang terbuka kemungkinan lebih tepat untuk melihat kasus Indonesia. Nasionalisme Indonesia, seperti umumnya di kebanyakan negara berajah, muncul

<sup>5</sup> Michael Ignatieff, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1993).

<sup>6</sup> David Miller, *On Nationality* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

<sup>7</sup> Lihat misalnya Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Conflicts the Secular* (Berkeley: University of California Press, 1993). Buku ini membahas masalah nasionalisme di era kesempitan dan perlawanan terhadap modernitas sekuler.

<sup>8</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Verso, 2000).

dan kalangan elite dan mendapatkan tempat di masyarakat dalam jaringan sosial mereka dan karena adanya perasaan keterasingan dan ketunggalan yang mereka alami. Kesadaran nasionalisme yang diperkuat oleh kalangan terdidik di Indonesia tumbuh karena perasaan terasing yang menimbulkan perasaan marah di kalangan elite. Nasionalisme pada saat itu identik dengan semangat pembelaan dan kemerdekaan dan lahirnya cita-cita tentang Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.

Tulisan Anderson bahwa bangsa adalah hasil dari imajinasi dalam konteks ini juga perlu dilihat secara kritis. Imajinasi tentang bangsa dalam konsep Anderson tampaknya meniru pada model bangsa-bangsa yang sudah dikenal pengalaman Barat. Pengalaman Barat itu menjadi semacam modul yang dapat dijiwai oleh negara-negara dunia ketiga. Tetapi, peranan para nasionalis tidak berkurang sebagai subyek seperti dikatakan Partha Chatterjee sering ditanyakan, Chatterjee lebih lanjut mengkritik bahwa bukan hanya kekayaan dunia ketiga dieksploitasi dan dijiwai, imajinasi bangsa-bangsa ini juga selamanya dijiwai. Ia mengatakan 'Even our imaginaries must remain forever colonized'.

Klaim Chatterjee tidak hanya sebagai kritik akademis tetapi juga dapat ditunjukkan dalam realitas perkembangan nasionalisme di dunia ketiga termasuk di Indonesia. Berdasarkan kritik ini, kita bisa melihat nasionalisme Indonesia terutama pada awal terbentuknya sebagai nasionalisme yang tidak hanya mengikuti modul yang ada di Barat, tetapi menyuguhkan berbagai nuansa seperti Bangsa Indonesia yang menjadi bagian penting pembangunan nasionalisme Indonesia, budaya, dan sekolah tradisional seperti pesantren yang punya semangat sendiri. Nasionalisme Indonesia juga sering mengkonstruksinya sendiri seperti diperlihatkan dalam perdebatan yang kita tentang bentuk negara dan asal politik luar negeri. Anak bangsa ini pernah membayangkan sebuah model negara integrasi dengan referensi pada nilai-nilai tradisional tentang pondasi semestaistik kekhususan Jawa. Sebagian juga membayangkan tentang model negara Islam. Dalam politik luar negeri pedo Bung Hatta yang sangat terkenal yang kemudian dirumuskan dalam kata-kata "mendukung kawan dan karang" adalah sebuah

Partha Chatterjee, 'Whose Nationalism?', dalam *Essays on Postcolonialism* (New York: Oxford University Press, 1993), hal. 215.

imajinasi dan tuntutan untuk menjadi subyek yang berbeda dengan Barat di dunia internasional.

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa konsep Anderson memang bisa meributkan tentang asal dan perkembangan nasionalisme namun seperti kata Chatterjee peran para nasionalis sebagai subyek lebih kompleks daripada sekedar mengikuti 'modul' tentang contoh nasionalisme di Barat. Kabar hanya sekedar mengikuti modul atau contoh di Barat tentu nasionalisme itu tidak menemukan dukungan yang kuat dari kalangan akar rumput dengan semangat kemandirian yang mulai tumbuh. Kompleksitas pengalaman Indonesia dan dunia ketiga ini perlu dicatat karena ia membedakannya dengan pengalaman nasionalisme di Barat.

#### Konsolidasi Nasionalisme dan Kedaulatan

Pengalaman dunia ketiga yang kompleks dalam hal nasionalisme dapat dilihat dari bagaimana mereka menghadapi ancaman domestik dan global. Negara-negara Barat yang relatif homogen secara budaya, etnis dan bahasa tidak mengalami masa-masa sesulit di dunia ketiga karena berbagai masalah persatuan telah terselesaikan ketika mereka menjadi sebuah negara. Sementara negara-negara dunia ketiga meragukan warisan administrasi colonial yang seringkali tidak homogen secara budaya, sejarah, agama dan bahasa yang dikendalikan hari merupakan potensi konflik.

Sebelum meredakan perkembangan nasionalisme di Indonesia lebih lanjut, tulisan ini ingin menguraikan lebih dahulu bagaimana konsep nasionalisme telah dirumuskan ketika berhadapan dengan berbagai persoalan negara di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, rumus berbagai kelompok separatis sementara di luar negeri, globalisasi telah menggoyahkan sendi-sendi kedaulatan negara dan menguji nasionalisme dengan kesetiaan kita. Perlu dicatat disini bahwa perkembangan nasionalisme yang semakin dini semakin memunculkan konsep ini dalam tarikan terutama karena tuntutan pemertahanan dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan kesetiaan terhadap negara menjadi berkurang.

Di dunia ketiga persaingan kemerdekaan adalah satu hal penting, seperti upaya menjadi persatuan negara yang baru merdeka ini lebih penting dan kompleks. Dalam konteks ini, nasionalisme dianggap

sebagai suatu kata kunci dan roh untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan. Anderson menjelaskan bahwa nasionalisme adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam satu negara dan merasakan persamaan nasib serta memiliki minat tentang masa lampau bersama yang jaya. Nasionalisme, menurutnya, berkembang karena perkembangan teknologi media cetak yang menyebarkan kesadaran kebangsaan itu.<sup>1</sup>

Nasionalisme kemudian meluas dan diterima sebagai sesuatu yang selarasnya diadopsi oleh semua bangsa, dan bahkan selagi orang menganggap lahirnya negara seperti Indonesia sebagai berkah dan karunia dari Tuhan. Dalam kadar tertentu memang kemudian ada aspek religius dari tiap nasionalisme. Pada awal perjuangan kemerdekaan sebagian masyarakat Muslim menganggap berjuang melawan penjajah adalah juga tugas agama dan jihad. Tetapi lebih dari itu kesadaran untuk rela berkorban dan mati sebagai *martyr* untuk negara, adalah juga bersifat religius dalam pengertian religiusitas yang lebih luas.

Namun apapun cara pandang kita, pada mulanya dan dalam perkembangannya di kemudian hari, nasionalisme adalah sebuah proyek elit dan kalangan terdidik. Pada elit terdidik ini lah yang melakukan konsolidasi nasionalisme dan kedaulatan. Pada mulanya nasionalisme digunakan untuk membakar semangat rakyat untuk merdeka dan bersatu. Kemudian setelah merdeka, nasionalisme menjadi milik para pemimpin untuk memperkuat bangsa dan negara serta kadang-kadang untuk kepentingan pemerintahannya sendiri. Bila negara sudah merdeka, nasionalisme diperlukan untuk memperkuat kedaulatan dan untuk melindungi kedaulatan dari apa yang mereka sebut dengan 'ancaman' intervensi asing. Memang ciri utama nasionalisme seperti dikatakan oleh Nand Mircovic menyangkut (1) kepedulian terhadap identitas nasional, dan (2) upaya untuk mempertahankan kedaulatan politik negara.

Dalam konsolidasi nasionalisme, negara dan kedaulatan ini, para elit penguasa mengklaim bahwa identitas negara dianggap tidak dan tidak dapat dironggi oleh negara lain dalam hal apapun. Di antara para

elit politik kedaulatan menjadi sangat dekat dengan nasionalisme dan harga diri bangsa. Ungkapan yang paling sering terlintas adalah kecemasan terhadap bangsa dan negara lain 'yang mengancam-ugung-ugung harga diri bangsa'. Ini kemudian melahirkan pembelaan terhadap bangsa atau dengan kata lain memunculkan perasaan nasionalisme untuk menentang mereka yang mengancam kedaulatan bangsa itu. Kedaulatan dalam konteks ini juga dimaknai selagi 'harga diri' bangsa. Kedaulatan sering juga disamakan dengan keutuhan bangsa. Berdaulat berarti kita dapat mengontrol semua wilayah-teritorial dari cangkup tangan asing dan dari gerakan separatisme di dalam negeri. Atas nama kedaulatan segitah bentuk intervensi dan separatisme menjadi sah untuk dibasmi terwujud dengan kekuatan militer.

Dalam konteks ini, di tangan para penguasa politik, kedaulatan menjadi alat *show-off* dan ampul untuk memobilisir massa dan mendorong nasionalisme. Penguasa rejim otoriter, menggunakan prinsip ini untuk menolak setiap campur tangan asing terhadap pemerintahan mereka terutama yang menyangkut masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Para penguasa ini berlindung di balik prinsip kedaulatan dan non-intervensi untuk melawan tekanan internasional ini.

Namun konsolidasi negara-negara dunia ketiga dalam perkembangan globalisasi sering mengabaikan esensi kedaulatan sebagaimana dimungkakan dalam teori kedaulatan klasik. Sebuah negara dianggap berdaulat kalau mereka sudah mengkonsolidasi diri, *sovereign* dan kuat. Kedaulatan demikian oleh Robert Jackson disebut dengan kedaulatan positif dalam pengertian negara ini punya kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu (*freedom to*, sementara negara yang di luar kategori ini hanya menggunakan jargon hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan. Negara-negara seperti ini dianggap berdaulat secara pasif dan diimbuhkan dengan *freedom from*. Mereka bebas dan berdaulat karena memang ada hukum internasional di dalam masyarakat internasional yang melindungi mereka dari ancaman intervensi.

Sehabis perang dingin, negara-negara dunia ketiga melakukan konsolidasi kedaulatan negatif ini untuk melawan tekanan Barat dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Kedaulatan mendapatkan signifikansi baru dalam konteks ini ketika negara-negara

<sup>1</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso, 1983.

<sup>2</sup> Sverre Mervin, 'Nationalism' in Edward N Zalta (ed), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2014, Metaphysics Research Lab, Stanford University). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/nationalism/>, accessed 23 May 2014.

<sup>3</sup> Robert H. Jackson, *Quasi-sovereign Sovereignty: International Relations and the Third World* (Cambridge: Cambridge University Press 1993).



seperti Cina, Indonesia dan ASEAN pada decade 1980an bersatu melawan tekanan Barat terhadap apa yang mereka anggap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebelum itu ASEAN sendiri dibentuk untuk membangun solidaritas yang kuat melalui prinsip saling menghormati dan tidak campur tangan pada urusan internal negara anggota yang lain. Dengan terbentuknya ASEAN memunculkan ambisi territorial satu negara terhadap kedaulatan Negara lain menjadi reda dan diselesaikan dalam 'cara ASEAN' ('ASEAN way').

Perkembangan dalam praktek politik dunia ketiga ini menunjukkan bahwa negara-nasionalisme-kedaulatan berkembang menjadi tiga konsep saling terkait berhubungan timbal balik secara erat satu sama lain tidak terpisahkan bahkan saling memperkuat. Kedaulatan menjadi kuat karena ada nasionalisme yang pada gilirannya akan memperkuat state dan pemerintah yang sedang berkuasa. Sementara pemerintah menggunakan prinsip kedaulatan dan nasionalisme untuk kepentingan konsolidasi politik ke dalam dan juga ke luar. Artinya hubungan antara ketiganya membuat ketiadaan salah satu dan prinsip itu akan melemahkan prinsip yang lainnya.

**Ancaman Globalisasi terhadap Nasionalisme dan Kedaulatan**

Dalam perkembangannya, konsolidasi nasionalisme dan kedaulatan di negara-negara dunia ketiga terus mendapat tantangan. Selain tantangan dari dalam-dataran primordial, tantangan yang tidak kalah seramnya adalah ancaman globalisasi. Globalisasi meliputi banyak wilayah seperti ekonomi, politik, teknologi dan budaya. Yang paling mengkhawatirkan adalah pengaruh nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi memertihilis nasionalisme, tetapi ia sesuatu yang tidak dapat dibelakangi dan harus dihadapi. Era globalisasi telah menawarkan kepentingan-kepentingan baru dan juga adanya kesadaran baru. Kesadaran orang bukan lah pertama kali pada bangsa tapi kepada kemungkinan ekonomi dan politik

Sekarang muncul pandangan bahwa 'materi tidak mengenal nasionalisme'. Karena uang para pengusaha tidak peduli apakah negara dan rakyatnya akan hancur. Dalam krisis keuangan di Indonesia misalnya, para pengusaha melarikan modal dan uang ke luar negeri dan membiarkan pemerintahan bucuur dan anak negeri menderita.

Demikian juga dalam bidang pendidikan, dalam hal lingkungan hidup, dan dalam masalah nilai-nilai HAM, referensi orang adalah kepada nilai-nilai dan standar universal yang juga sering disebut nilai-nilai kosmopolitanisme. Negara hanya menjadi semacam tidak lebih dari tempat tinggal atau tempat persinggahan. Sementara apakah orang bekerja, melakukan sesuatu dan mengambil, apakah untuk negara atau kepentingan lain yang lebih luas tidak lagi menjadi persoalan.

Bila kita membicarakan keterbatasan peran negara ini maka pembicaraan terhadap kosmopolitanisme untuk mengatasi ketegangan antara globalisasi versus nasionalisme dan kedaulatan, menjadi tidak terlakkan. Berbeda dengan globalisasi yang merupakan fenomena external yang mempengaruhi definisi dan pemaknaan tentang negara, kedaulatan dan nasionalisme para elit, maka kosmopolitanisme berangkat dari analisis teori politik yang dicoba untuk diperluas ke dalam politik internasional oleh beberapa penulis seperti Charles Beitz<sup>2</sup>, Andrew Linklater<sup>3</sup>, Paul Keal<sup>4</sup> dan beberapa penulis lainnya.

Berbeda dengan globalisasi ekonomi neoliberal yang memiliki makna negatif bagi golongan kiri seperti gerakan anti globalisasi, maka kosmopolitanisme memiliki makna yang lebih netral bila tidak dapat dikatakan positif. Pengikut aliran ini meyakini adanya suatu nilai-nilai kemanusiaan universal yang merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat peralihan zaman-zaman, nilai-nilai dan budaya yang berbeda. Menurut kosmopolitanisme semua makhluk manusia, tanpa memandang afiliasi politik mereka, merupakan satu masyarakat bersama yang harus terus dihidupkan. Kemanusiaan yang universal ini bukan suatu yang mudah karena perkembangan dunia sekarang yang tidak menghiraukan batas dunia dan karena ketidakampunan negara sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dianggap 'internal' di negara ini. Muscularity inilah demokrasi kosmopolitan dari David

<sup>1</sup> Dengan demikian ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang bersifat organik. Era ketiga dimana dunia jenuh mereka memunculkan sebagian kedaulatan weak dalam bentuk kerjasama regional yang dapat meluaskan kepentingan bersama mereka secara lebih baik.

<sup>2</sup> Charles Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978).  
<sup>3</sup> Andrew Linklater, *After and Beyond in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1998).  
<sup>4</sup> Paul Keal, *Empire and Foreign Policy* (Allen & Unwin and the ANU, 1992).

Held" dan mengutarakan tuntutan '*humanitarian intervention*' terhadap negara-negara yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, di kalangan negara anggota PBB, merupakan dua contoh menguatnya paham kosmopolitanisme.<sup>26</sup>

Serua mendasar esensi kosmopolitanisme berbeda dengan seruan tentang peran negara dalam definisi kalangan realis. Bagi para pendukung realis, negara mendorong orang supaya tidak campur urusan negara lain. Dalam konteks negara, perilaku negara mendapat penbenaran dari teori-teori realis dalam hubungan internasional yang menggunakan negara sebagai aktor-aktor yang egois yang berdaya dan mengejar kekuasaan untuk kekuasaan. Negara juga dilihat sebagai *single actor* yang utuh dan utuh tidak mempunyai masalah di dalamnya.

Pada pihak lain kosmopolitanisme mendorong orang untuk peduli akan nasib orang lain. Para pendukung paham ini percaya akan humanisme universal yang merupakan sintesa dari berbagai nilai dan budaya di dunia. Setiap agama misalnya memiliki nilai universal yang diterima oleh pengikut agama lainnya. Gerakan-gerakan kosmopolitan universal menjadi aktor internasional baru yang memperjuangkan cita global tentang hak-hak asasi, demokrasi, perang dan damai. Deklarasi PBB tentang HAM universal misalnya adalah salah satu contoh dari upaya demikian, demikian juga berbagai konvensi PBB tentang hak-hak wanita, anak-anak, suku terpejal, kotornisasi lingkungan dll, berangkat dari asumsi akan adanya kemanusiaan universal yang harus dilindungi. Kepedulian internasional yang kuat terhadap penderitaan orang Aceh yang terkena bencana Gencam adalah contoh konkrit aspek kosmopolitanisme yang kuat di dunia.

Dalam konteks kosmopolitanisme, kita berbicara tentang hal yang lebih konkrit daripada sekedar pengaruh globalisasi yang seringkali destruktif terhadap negara. Globalisasi bersifat menghancurkan dan seringkali menimbulkan respon reaktif yang bersifat kekhawatiran akan hilangnya identitas diri sebagai bangsa. Kosmopolitanisme tidak menolak globalisasi bahkan merupakan bagian dari proses globalisasi nilai-nilai. Paham ini melihat ada solusi yang dapat dilakukan baik dalam konteks negara bangsa maupun dalam konteks global.<sup>27</sup> Kosmopolitanisme mengkritik kegagalan negara bangsa untuk memenuhi janji kedaulatan sebagaimana dalam pengertian klasik untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi warga, dan mencari solusi untuk masalah-masalah ini dalam level internasional.

Permasalahan yang dihadapi negara bangsa seringkali berasal dari ketidakmampuan menciptakan negara yang kuat dan pemerintahan yang baik, namun kadangkala juga karena memang kapasitas negara tidak memungkinkan penyelesaiannya tanpa campur tangan internasional. Berkaitan dengan ketidakmampuan negara, banyak literature yang telah membahas hal ini. Salah satunya adalah tadanya *good governance* dan kegagalan menciptakan iklim demokrasi di negara itu. Negara itu kadangkala terpuruk pada level yang disebut *failed states* seperti negara-negara di Afrika yang juga memerlukan campur tangan asing seperti *humanitarian intervention* atau bahkan intervensi militer untuk mengakhiri konflik bersenjata.

Karena kepedulian dan titik tolak dari kosmopolitanisme adalah individu bukan negara, maka kepedulian pertama adalah pada hak-hak individu. Ini tidak berarti bahwa negara ditolak keberadaannya oleh paham ini, melainkan diletakkan pada fungsinya untuk memenuhi hak-hak dan kesejahteraan individu. Bila negara tidak mampu maka dimungkinkan adanya justisi internasional untuk membantu negara mengatasi persoalan-persoalan dan kepentingan individu ini.

Keteguhan juga sering terjadi ketika para elit penguasa merasakan kepentingan dan perolehan dari warganya bertentangan dengan apa yang mereka anggap kepentingan bangsa yang biasanya didefinisikan dengan kepentingan kedaulatan dan persatuan bangsa. Sebagai kelompok yang merasa menjadi pengawal persatuan dan kebangsaan,

<sup>26</sup> David Held, *Cosmopolitan Democracy and the New International Order*, Ch. 11 *Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1995).

<sup>27</sup> Para kritikus politik sejak awal memang mengkritik lahir kedaulatan mulai dari dikalukn pada konsep kedaulatan. Filosof seperti Hugo Grotius, Alberico Gentili dan Francisco Suarez misalnya mengkritik kedaulatan Negara yang memusatkan mereka kedaulatan ini harus dibatasi. Di dunia internasional misalnya ada norma-norma internasional. Saat ini seruan pengrusak yang kerap digunakan oleh berbagai kelompok pengkritik dari Negara-negara tetangga, suatu istilah yang baru dengan prinsip internasionalitas seperti sekarang. Dan Philip S. Williams, dalam *Notional Encyclopedia of Philosophy*, 2005. <http://www.encyclopedia.com/sovereignty>, diakses 20 Juli 2015.

Lelah buku oleh Meili Gohman, *Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World*, dalam John Warrilow and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question, New Directions in International Relations* (London: Peter Publishers, 1995).

sempit kelompok elit mengklaim sebagai pemilik kebenaran dan membenteng mereka yang dipandang mengancam persatuan.

Kelompok-kelompok orodaya masyarakat biasanya sering dianggap sebagai kelompok yang melayani kepentingan asing dan mengancam persatuan. Kelompok non pemerintah ini berbicara hak-hak atau manusia, penungunya pemilihan yang jujur dan pemberantasan korupsi, dan hak-hak orang untuk mengeluarkan pendapat dan berwujud dan menentukan masa depannya sendiri yang kemudian ditunjukkan dengan pembelaan terhadap kelompok-kelompok di daerah yang tertindas. Namun mereka ini sering dianggap melayani kepentingan asing yang ingin mengancamurikan republik ini. Elit pemerintahan memiliki kaitan kuat untuk menentukan apa yang benar dan salah, dan kadang-kala mereka mendapat dukungan yang luas dari kalangan elit lain yang mengklaim sebagai pengawal negara dan nasionalisme. Sebahnya semakin kuat orang berantra anti separatisme, semakin keras sikap anda terhadap kelompok-kelompok "pencetus republik", semakin berkejar-kejar sesotang tentang penungunya persatuan dan kesatuan, maka semakin orang ini dianggap sebagai "nasionalis nilai".

Namun dalam arus globalisasi ini elit pemerintahan tidak bisa mengklaim kebenaran ini terus menerus. Mereka perlahan-lahan resign dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan global dalam ingin bertahan. Penghormatan terhadap hak-hak asas manusia dan perlindungan terhadap mereka yang didiskriminasi dan tertindas telah menjadi nilai global, walaupun kadangkala diuang oleh kepentingan politik negara besar. Walaupun banyak orang menyadari kepentingan Barat dan ketidkaidah dalam berbagai isu di dunia, namun tekanan global akan penerapan hak-hak asas ini merupakan realitas yang harus dihadapi oleh negara-negara yang masih otomotif.

Perkembangan Nasionalisme Indonesia dari Masa ke Masa

Dalam perkembangannya, pandangan *civic nationalism* yang menjadi akar persatuan sebelum kemerdekaan di atas nunggalnya telah sepenuhnya berganti seperti yang dibayangkan Soekarno dan kolektori lainnya. Tantangan di dalam negeri dan globalisasi telah menyebabkan nasionalisme bukan hanya milik segelintir orang dan didefinisikan oleh elit, tetapi juga digunakan sebagai alat politik ke

dalam negeri untuk menindas siapa yang dipandang tidak nasionalis dan di luar negeri digunakan untuk justifikasi agar negara-negara asing tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri seperti HAM dan demokrasi.

Tantangan pertama terhadap cita-cita nasionalisme terbuka ini sering dilihat dari perdebatan tentang bentuk negara yaitu dari kelompok Islam yang ingin mendirikan negara yang berlandaskan Islam dan kalangan nasionalis yang ingin mempertahankan negara sekuler berdasarkan Pancasila. Ini diudikan justifikasi untuk mengabdikan kesadaran kelungsaan atau perasaan nasionalisme bangsa." Kemudian muncul perlawanan-perlawanan kebaratnegerian seperti PRRI/Permesta untuk menuntut kemerdekaan Negara tampaknya tidak berhasil mengakomodasi berbagai kelompok yang kecewa karena aspirasi mereka tidak dipertimbangkan. Perkembangan ini seolah-olah mengkonfirmasi adanya etnik-etnik atau agama tertentu yang berhalak untuk mengklaim Indonesia atau menasabkan diri dari Indonesia. Orang misalnya bisa menyebut nasionalisme Timora, nasionalisme Aceh, nasionalisme Islam, nasionalisme Kristen dsb.

Presiden Soekarno pada masa Orde Lama tampaknya ingin mengakomodasi konflik ini dengan ide NASAKOM yang berusaha merangkul semua aliran ideologis dominan di Indonesia. Berdasarkan asumsi ini, bentuk nasionalisme Indonesia semasa Presiden Soekarno adalah kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme ini mengabdikan adanya ancaman ancaman dari luar terus menerus terhadap kemerdekaan Indonesia. Ancaman ini disebutkan berasal dari imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara kapitalis dan kemudian negara-negara yang dimasukkan dalam *Old Established Powers (Okefow)*. Ancaman ini kemudian ditanggukkan dari musuh dikemungkinan Iran Barat oleh Belanda dan terbentuknya Federasi

Sejarah dan Hancu masalah membagi perpolitikan Indonesia dalam kategori berikut. Hari pertama 24 partai ini menjadi yaitu aliran ideologis, yaitu : 1. Islam, terbu dan PBB, PBB, PKS, PUP dan Partai Persatuan Nakhlatul Ummah Indonesia, 2. Nasionalis Belgia, misal dari PKI dan PAN, 3. Nasionalis Sekuler, PDI-P, Partai Pelopor, PAN, Mahasiswa, PSBB, PPD (Dewan Haryanto), 4. Nasionalis Pragmatik, di antaranya Golkar, PKPB IR, Haryono, PKP (Bak Sudarto), Partai Panitia, Partai Demokrasi dan PPD (Dewan Sugito), 5. Sosial Demokratik seperti PBB, Partai Merdeka Uda Soesilo, PPSD (Mochtar Pakudis), PSI dan Partai PDK (Djoe Haryono), 6. Kristen, Partai Damai Sejahtera (Buyond Haryono)

Melan sebagai bagian dari proyek imperialisme Barat. Kedua bentuk nasionalisme ini kemudian dihadapi dengan mobilisasi massa untuk menentang Iran Barat dan setelah itu kampanye ganyang Malaysia.

Dalam kaitan politik, proyek nasionalisme Soekarno adalah proyek elite. Nasionalisme digunakan untuk mengatasi berbagai konflik dan kesulitan yang dihadapi oleh negara baru merdeka. Konflik politik internal ditandai dengan rivalitas yang meningkat antara militer dan kalangan komunis di satu sisi dengan seruan untuk melawan imperialisme dan luar. Masyarakat disuburkan dengan cita-cita dan bayangan tentang kemerdekaan Indonesia untuk melupakan sementara persoalan real yang dihadapi oleh bangsa dan negara seperti masalah ekonomi, pemerintahan dan pembangunan.

Seperti pada masa perlawanan terhadap penjajahan, proyek nasionalisme elite ini masih mempunyai daya yang kuat di masyarakat. Kepawaan Soekarno selaku seorang *solitary worker* dalam istilah Herbert Feist, mempersatukan massa untuk bersatu, bahkan berkorban untuk menunjukkan perasaan nasionalisme mereka. Koneksi internasional ketegangan Timur Barat dan masih terudanya banyak negara di dunia ketiga oleh penjajahan menjadi lahan subur bagi politik lambongan Soekarno untuk bergema di dunia internasional. Ini menambah kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan antara lain sebagai lambung bangsa baru merdeka bernama Indonesia.

Hasilnya seperti nasionalisme pada masa revolusi, pada masa Soekarno, nasionalisme memiliki *appeal* yang sangat kuat dengan berbagai motif termasuk kepriyain masa lalu dan keberartian terhadap Barat. Masyarakat bahkan menganggap Soekarno sebagai Ratu Adil yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kerelaan berkorban yang muncul menunjukkan kuatnya aspek transendental dari nasionalisme ini. Nasionalisme pada masa Soekarno dengan demikian bersifat romantik.

Tetap selanjutnya dari nasionalisme di Indonesia adalah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, memang Indonesia menjadi bagian dunia internasional dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang politik para elite pemerintah tetap lah pembegang definisi nasionalisme. Nasionalisme sebagai rumus menjadi ideologi atau alat negara untuk melinau dan melekreditkan mereka yang akan pemerintahan baik terhadap ancaman yang dianggap datang dari dalam maupun dari luar. Di dalam konsep nasionalisme ideatik dengan persahutan dan kesatuan. Kelompok oposisi anti mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah dianggap karena akan mengancam persatuan dan

stabilitas. Perbedaan diarahkan bukan dengan menyelesaikan pokok persalamannya tetapi ditindas dan disembunyikan dibawah karpet.

Dalam hubungan luar negeri, nasionalisme berarti kedaulatan, integritas dan identitas bangsa. Tekanan agar ada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, demokrasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pada masa Orde Baru dianggap sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan RI. Nilai-nilai universal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa atau demokrasi Pancasila yang juga didefinisikan secara sepihak oleh pemerintah Orde Baru. Untuk masalah kedaulatan ini, pada saat itu Indonesia berkoalisi dengan Negara-negara yang memiliki masalah dengan hak-hak dasar manusia seperti beberapa Negara ASEAN dan Cina, untuk melawan apa yang disebut dengan campur tangan asing terhadap kedaulatan negara.

Jadi berbeda dengan pandangan awal nasionalisme, nasionalisme Orde Baru kehilangan ruli kemauan untuk melawan penindasan. Nasionalisme didefinisikan oleh negara tanpa ada konsultasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Masyarakat lah yang harus menyesuaikan dengan definisi nasionalisme negara bila ingin selama dan mempunyai peran dalam negara Orde Baru.

Namun apakah upaya negara Orde Baru ini tidak berjalan dengan mulus. Berlawanan dengan upaya negara itu, semua periode yang bisa disebut sebagai pasca-Orde Baru, nasionalisme mulai mengalami redefinisi di kalangan masyarakat sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintahan yang mengintegrasikan Indonesia ke dalam dunia internasional dalam bidang ekonomi. Bila nilai-nilai dan kearifan lokal tertindas oleh mesin asimilasi budaya Orde Baru, kesadaran kemasyarakatan sebagian masyarakat tetap terajah karena globalisasi dan informasi dan karena keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan politik internasional.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, perbedaan tentang nasionalisme sampai sekarang menjadi sangat menarik. Definisi nasionalisme yang hanya mengambil aspek anti asing masih tetap kuat. Tetapi definisi ini semakin dipandang semakin sempit dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Terdapat argumen bahwa Indonesia yang kaya secara ekonomi akan memperkuat kedaulatan bangsa dan akan membuat Indonesia sejajar dengan bangsa modern lainnya. Kebanggaan akan bangsa dan negara akan kuat seiring dengan kuat dan modernnya negara dan bangsa Indonesia. Untuk tujuan ini mau tidak mau Indonesia harus bergabung dan

mencantoni negara-negara yang sudah maju dan modern di dunia yakni negara-negara kapitalis Barat.

Karena itu lah tidak mengherankan salah satu perdebatan tentang nasionalisme Indonesia sampai saat ini berputar pada soal nasionalisme ekonomi dan liberalisasi ekonomi Indonesia. Kelompok nasionalis menuduh kalangan yang meliberalkan ekonomi Indonesia dengan membuat berbagai persetujuan ke pihak asing, tidak nasionalis dan akan membuat Indonesia di bawah dominasi asing. Dalam pandangan ini, kita kehilangan kebebasan dan terperangkap pada kapitalisme. Bagian demi bagian negeri ini kemudian akan dikuasai oleh orang asing. Kedaulatan dan harga diri kita menguati terinjak-injak.

Pada pihak lain beberapa kalangan lain terutama kalangan ekonomi memandang liberalisasi ekonomi Indonesia adalah bagian tidak terelakkan dari globalisasi ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme dalam pengertian kelompok pertama. Bagi mereka, Indonesia harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar internasional dan harus siap bersaing menghadapinya. Kelompok terakhir ini secara eksplisit tidak pernah berbicara tentang nasionalisme. Tetapi apakah ini berarti mereka tidak nasionalis lagi? Dalam pengertian nasionalisme, chauvinisme ala Orde Lama, tentu saja mereka tidak nasionalis. Sering dengan globalisasi dan tuntutan akan nilai-nilai global termasuk kapitalisme dan demokrasi, telah muncul generasi baru terutama di kalangan muda. Kelompok-kelompok kebangsaan pembaharuan Orde Baru, semakin meribesot dan merupakan realitas yang adanya perlu difahami terwujud dalam kaitan dengan nasionalisme.

Keterikatan mereka tidak lagi sesera sempit pada tanah air Indonesia. Budaya mereka tidak lagi terutama budaya lokal tapi budaya Barat, musik dan film Barat, juga musik dan film India, kerdang-kardang juga selendawa dari Amerika Latin. Mereka mencontohi semua yang berbau "asing". Dalam bidang politik dan hak-hak asasi mereka mengesani perlakuan sewenang-wenang terhadap kelompok yang dilabeli "separatis". Mereka berdagang dengan siapa saja tanpa mengenal batas negara.

Dengan kata lain sebenarnya kita sedang melihat tumbuhnya aktor-aktor dan anak-anak bangsa yang semakin kosmopolit. Mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai persaudaraan global dan universal. Mereka memiliki semangat patriotisme tetapi tidak terfokus pada membela negara tetapi juga membela kepentingan individu dan manusia yang lebih luas. Negara adalah penting sebagai tempat tinggal, seperti tempat lahir yang diturunkan untuk berkampol dan bergumul, tetapi cara berfikir dan pembelaan mereka adalah pada kemanusiaan global.

Kecendrungan ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dulu di mana-mana orang membela Nelson Mandela sebagai pejuang kebebasan di Afrika Selatan dan membenci George Bush, Presiden AS yang suka perang. Seluruh masyarakat dunia pernah dengan penderitaan rakyat Aceh karena bencana Tsunami. Bantuan datang dari berbagai kalangan masyarakat sampai pada anak-anak sekolah. Patriotisme mereka melewati batas negara, yaitu pada kemanusiaan universal.

Di Indonesia, negara sentralistik, serikatnya dengan satu definisi nasionalisme tidak mampu mengantar semua daerah sehingga harus memberikan otonomi pada daerah-daerah. Ini artinya memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Ini memudahkan mereka menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Seperti pada masa Jalan Sutera yang juga melewati kawasan Nusantara, sebuah dunia kosmopolitas terbentuk karena perdagangan lalu bisa juga menjadi jaringan sistem intelektual dan agama dengan wilayah-wilayah lain. Nusantara selanjutnya terutama mereka yang tinggal di pantai, karena posisinya geografis yang strategis dan masyarakatnya yang dinamis, sejak lama sebenarnya adalah masyarakat kosmopolit.

Dalam konteks dan kecenderungan global ini, semakin banyak orang membayangkan menjadi warga dunia (*world citizen*) dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu lah nilai-nilai dan semangat generasi Baru produk modernisasi dan globalisasi sekarang tidak dapat difahami dalam pengertian lama nasionalisme, yaitu cinta dan pembelaan kepada tanah air secara total bahkan transedental. Nilai-nilai semangat dan patriotisme mereka mestinya difahami dalam

semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemurniaan global. Tetapi, satu tidak semua nilai-nilai global kondusif untuk menciptakan nilai-nilai kemurniaan global. Tidak semua kelompok generasi ini mengemban semangat untuk meregalkan universalisme nilai kemurniaan.

Mesti dibedakan di sini misalnya gaya hidup Barat dengan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan etika dalam kapitalisme. Nasionalisme dalam pengertian sempit dan klasik, penerapan Negara Orde Baru di atas berada dalam keadaan karu-karu (samar) dan dengan demikian harus didefinisi. Nasionalisme negara Orde Baru terasa sempit karena melihat segala sesuatu yang di sekitar negeri ini penuh dengan ancaman. Refleksi dari pandangan sempit tentang nasionalisme masalah dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Cobalah baca fiksi-fiksi Indonesia mitakhir, khususnya setelah 1990-an. Cobalah simak puisi-puisi anak-anak muda kita sekarang. Cobalah saksikan simulasi-sinetron yang bergentayangan di televisi kita. Cobalah dengar teriakan anak-anak muda di jalanan. Adakah sesuatu yang disebut nasionalisme Indonesia diperjuangkan? Adakah yang disebut nasionalisme menjadi sesuatu yang penting? Maaf, dengan berbesar hati dan berlapang dada, harus saya katakan, ternyata tidak. Tidak ada itu nasionalisme Indonesia... Nasionalisme dalam pengertian identitas kebangsaan sungguh menjadi dekaden, dan sangat mungkin tidak diperjuangkan lagi."

Apakaya sulit menglatapkan atau memaksa generasi sekarang dan akan datang di Indonesia untuk berteriak "merdeka atau mati" karena musuh telah berubah dan musuh telah berganti.

Namun sayangnya definisi *manifestasi* tentang nasionalisme seperti dikatakan oleh Santoso masih berasumsi bahwa nasionalisme adalah terutama anti penjajahan atau anti-ancaman kekuatan asing. Walaupun ancaman asing untuk mengoyak kedaulatan Indonesia tidak kurang, rezim Orde Baru, misalnya, tetapi *manifestasinya* nyata dalam wacana persatuan. Seperti dikatakan dimuka nasionalisme ini didefinisi dalam karamata kedaulatan bangsa dan negara, menjaga batas-batas teritorial dan mempertahankan negara dari ancaman dari luar dan dari dalam. Nilai-nilai

universal demokrasi dan hak-hak asasi bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara. Negara atau kelompok yang melakukan itu dianggap sebagai rangup tangan asing.

Jika tidak didefinisi, maka nasionalisme ini akan terlihat -seperti dikatakan oleh Abespriyadi Santoso, sebagai nasionalisme *maximalistis* yang serba takut, suatu nasionalisme *sekolofrenia* dan *acrophobia*.<sup>2</sup> Reaksi terhadap segala permasalahan bangsa pun terasa brutal. Santoso memberikan contoh tentang hal ini:

"Lihat misalnya reaksi kekerasan tentara di Timor Timur ketika mereka harus menghancurkan September tahun 99, keagetan dan trauma publik ketika kita kehilangan pulau pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002, kesemburan Jakarta dengan memaksakan pemekaran Papua dengan semangat *vide et impera* tahun 2003 dan tengok pula jungsisme, semangat yang terbakar dalam kasus perairan Ambalat Maret lalu, dll."

Perkembangan nasionalisme Indonesia dari masa ke masa ini bisa didefinisikan dalam table berikut ini. Ada beberapa komponen yang dapat disimpulkan dari perkembangan nasionalisme yaitu bagaimana negara mendefinisikan nasionalisme, hubungan elite massa, pandangan tentang kedaulatan, tema-tema dan sifat nasionalisme.

Tabel. Isu-isu, ciri-ciri dan tahap-tahap nasionalisme Indonesia

Isu/Periode	Pra/awal kemerdekaan	Masa Soekarno	Masa Soeharto	Pasca-Orde Baru
Proses pendefinisian nasionalisme	Bervarna	Negara	Negara	Bersama
Hubungan elite-massa	Dialog	Pemungutan dominan	Dominasi negara	Dialog global
Hubungan dengan kedaulatan	Tanah air dipertaneka	Tanah air diperjuangkan	Mengapa kedaulatan	Tanah air sebagai bagian dari dunia

<sup>1</sup> Alifza Sukarna, 'Bintang Nasionalisme Kemurniaan Putih', *Media Indonesia* 28 Oktober 2004.

<sup>2</sup> Abespryadi Santoso, 'Hati Prihatin? Apa Lalu Delahatungsi', *Bahia Negeri* 10 June 2003.

an				
Tema-tema dalam nasionalisme	Kesederajatan, kebebasan universal	Harga diri bangsa, anti imperialisme dan anti kolonialisme	Melawan campur tangan asing, ancaman terhadap persatuan dan kedaulatan	Nasionalisme dengan semangat kemanusiaan universal
Sifat	Revolusioner-humanistik	Revolusioner-romantik	Xenophobia-Developmental	Humanistik-kosmopolitan

Table di atas tentu saja mengandung penyederhanaan terhadap realitas kompleks perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun secara garis besar dari periode pemerintahan yang digambarkan ciri-ciri yang ditampilkan sedikit banyak merefleksikan suasana umum pada periode tertentu. Pada periode saat ini dimana terdapat keterbukaan sistem politik, kemungkinan suatu nasionalisme yang terbuka seperti dibayangkan oleh Soekarno menjadi mungkin dilakukan.

#### Relevansi Pemikiran *Civic Nationalism* dan Globalisasi

Dalam mengisi nasionalisme pasca Orde Baru, pemikiran tokoh-tokoh bangsa pra maupun setelah kemerdekaan tetap menunjukkan relevansinya buat Indonesia. Walaupun tidak secara penuh, sebagian ide nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila terutama pada pemikiran Bung Karno adalah lebih dekat dengan *civic nationalism* daripada *ethnic* atau *religious nationalism*. Kita perlu melihat bagaimana keberhasilan cita-cita *civic nationalist* ini dalam nasionalisme Indonesia dalam berhadapan dengan globalisasi dan kosmopolitanisme dewasa ini.

Ide *civic nationalism* paling jelas muncul dalam artikel Soekarno "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" di tahun 1926. Dengan mengutip Renan ia mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah:

"...suatu riwayat, suatu azas-akal, yang terjadi dari dua hal pertama-tama rakyat itu dulunya harus berwarna-sama mengalami satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan hulu, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan "bangsa" itu... Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-hal yang telah dijalani oleh rakyat itu."<sup>6</sup>

Kutipan ini jelas menunjukkan bahwa pilihan Soekarno tentang nasionalisme bukanlah nasionalisme sempit seperti di sebagian negara Eropa yang berdasarakan ikatan emosional etnis, suku atau agama, tetapi nasionalisme yang terbuka berdasarakan riwayat hidup rakyat yang sama dan keinginan meribungkan mimpi bersama ke depan.

Bukan lah suatu kebetulan bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno dalam pidato yang dikenal dengan pidato kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945, juga telah berbicara tentang bagaimana berhadapan dengan nilai-nilai global kosmopolitan ini dan apa pengaruhnya pada negara-negara merdeka dan berdaulat. Ia mengakui pentingnya nilai-nilai global kemanusiaan atau dikenal juga dengan nilai-nilai kosmopolitan umum pada saat yang sama ia tetap mengabdikan pentingnya peran negara kebangsaan Indonesia dalam konteks global ini. Seperti dikatakannya nasionalisme Indonesia harus menyelamatkan pekemanusiaan. Ia menyebut nasionalisme demikian dengan sosionasionalisme dengan prinsip humanisme yang tidak dibatasi pada supremasi ras, warna kulit maupun agama tertentu. Ia mengatakan:

"Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit, ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari pada kesombongannya bangsa... ia adalah nasionalisme yang lebar-nasionalisme yang timbul daripada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; ia bukanlah 'jingo-nationalism' atau chauvinisme. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kebaruan dan keluasannya memberi tempat sama pada lain-lain bangsa, sehingga lebar dan luasan

<sup>6</sup> Soekarno, "Nasionalisme, Islamisme, Marxisme" (Salah Babonca Muda, 1926), dalam *Ekspres Berkeadilan* Remaja, 1963, hal. 3.

negara, yang memberi tempat sekuat sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup."<sup>1</sup>

Dinamika hubungan antara elit dengan rakyat, dan perbedaan tentang konsep nasionalisme ini sendiri di kalangan elit menunjukkan kompleksitas nasionalisme bangsa Indonesia sebagai subyek untuk menentukan masa depan sendiri. Kedekatan antara pemimpin dengan rakyat pada saat itu juga membantu perkembangan faham nasionalisme. Seperti dikatakan Bung Hatta bulan Oktober 1951:

"Ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama... Apabila kita mau membangun dalam berbagai lapangan ekonomi, maka kita berhadapan dengan berbagai soal, yang sebagian boleh dikatakan terletak dalam lapang kebudayaan. Selain soal pakaran dan ciptaan yang menjadi motor pembangunan ekonomi, kita hadapi juga soal-soal yang mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat. Adakalanya berbagai hal yang kemudian ini menjadi halangan bagi aktivitas dalam pembangunan ekonomi... Sifat kultur ialah memelihara, memipuk, Barang-barang kultur yang dibangunkan dipupuk supaya subur tumbuhnya, untuk memberikan hidup yang lebih mulia kepada manusia."<sup>2</sup>

Nasionalisme mendapat tempat dengan repat di kalangan rakyat karena sebelumnya di masyarakat memang sudah ada lembaga-lembaga dan nilai-nilai budaya dan agama yang di dalamnya antara lain berisi semangat memperjuangkan persamaan dan keadilan. Hal ini misalnya tercermin dalam perlebatan nilai-nilai tentang nasionalisme antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetatno Soerjokoesoemo. Menurut penelitian Takashi Shirasu, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kurniawan:<sup>3</sup>

"Tjipto mendirikan Budi Utomo dan Indische Partij, sedang Soetatno mendirikan Komite Nasionalisme Jawa. Debat ini diterbitkan tahun 1918 dalam bentuk selebaran berjudul *Javaansche of Indische Nationalisme*. Soetatno mengemukakan nasionalisme Jawa yang dipandangnya lebih jelas dalam landasan bahasa dan kebudayaan untuk sebuah bangsa. Dalam cara pandang ini, Soetatno mengutamakan peran pandita sebagai pencipta ketertiban dalam kecacauan pergerakan dengan memperbaiki hubungan kawulo-gusti, rakyat menjadi kawulo sang pandoe ratu. Di seberangnya berdiri Tjipto dengan nasionalisme Hindia dengan penanaman jiwa samu sejati, yaitu kelahiran moral, melalui perlawanan tanpa kompromi terhadap penindasan dan pemeasaan Belanda para priyayi terhadap rakyat."

Kemampuan dan kearifan pemimpin untuk memelihara dan menipuk semangat kebangsaan telah menjadi kekuatan besar dari nasionalisme Indonesia. Dalam perdebatan itu pandangan tentang Indonesia yang lebih luas dan integratif mengalahkan pandangan lokal sebagaimana dicerminkan dalam lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.<sup>4</sup> Proses perdebatan yang berangkat dari nilai dan kearifan lokal seperti ini membuat nasionalisme itu kemudian tumbuh subur di masyarakat. Penindasan, ketidaksederajatan dan ketidakadilan agaknya merupakan kata kunci yang melancarkan perlawanan terhadap penjajahan dan munculnya aspirasi tentang sebuah negara merdeka yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Bila nasionalisme di Barat terbatas pada etnisitas maka di Indonesia berbagai hal seperti budaya, Bahasa dan agama menjadi satu dalam membentuk nasionalisme. Karena itu nasionalisme Indonesia pada mulanya mengadung semua elemen perlawanan dari berbagai nilai. Nasionalisme ini sekaligus dengan sendirinya, bersifat religius karena merubca suatu keyakinan dan kerelaan untuk berkorban bahkan untuk mati demi membeicanya.

Suatu pandangan positif perlu dikembangkan dengan menempatkan ancaman nilai-nilai global ini dalam konteks pemahaman Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, globalisasi ini mesti dilihat sebagai tantangan nilai-nilai global terhadap Pancasila yang mesti disambut secara terbuka. Lebih khusus lagi, sebuah pandangan positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan global atau kosmopolitanisme perlu mendapat perhatian sebagai salah satu

<sup>1</sup> Soekarno, *Sekali Lagi Tentang Sosio - Nasionalisme dan Sosio - Demokrasi* dalam *Dalam Bendera Berubah*, (1963).

<sup>2</sup> Dikutip dalam Jakob Sumarto, 'Nasionalisme Indonesia Baru Perspektif Budaya', *Pikiran Rakyat*, 11 Juli 2014.

<sup>3</sup> Takashi Shirasu, 'Nara' vs 'Panda', *Sekali Lagi* dalam *Menanti Bangsa* dalam Akira Nakamura (edisi), *Indonesia dalam Rongga Sorotan Jipso* (Penerbitan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, diambil dalam Kurniawan, 'Diskursus Nasionalisme: Amelak Masa Lalu di Panggung Masa Kini' [http://www.griestres.com/?main=catatan\\_filsafat\\_amelak.html](http://www.griestres.com/?main=catatan_filsafat_amelak.html), diakses Juni 2011.

<sup>4</sup> Kurniawan, *ibid*.



akan keluar dikemudian globalisasi versus nasionalisme. Dalam konteks pemikiran Soekarno dan para tokoh nasional Indonesia mempunyai relevansinya. Sudah saanya nasionalisme yang keluhannya akar nilai-nilai keratifan lokal ini didefinisi. Dengan kecenderungan globalisasi atau lebih tepatnya mengutamakan gerakan kosmopolitanisme di dunia internasional, nasionalisme Indonesia akan menemukan bentuk baru yang mamutawi. Di sini kemudian relevansinya untuk meninjau kembali pandangan-pandangan awal tokoh kebangsaan tentang nasionalisme ini. Ada baiknya sebagai penutup diketimunkan tentang pandangan Soekarno tentang nasionalisme dan kosmopolitanisme pada pidato kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 berikut ini.

"Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justu inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "internasionalisme". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukankah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak ada adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam bumi nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tanah-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain."

**Kesimpulan**

Nasionalisme sampai sekarang dipandang sebagai sesuatu yang positif dan harus dibekang. Namun tulisan ini menunjukkan bahwa nasionalisme kadang-kadang hanya melihat kepentingan sekompok elit saja. Berangkat dari asumsi bahwa nasionalisme pada mulanya adalah gerakan elit dan kalangan terpelajar, tulisan ini melihat bahwa dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan elit dan negara. Kadangkala nasionalisme ini keluhannya sentuhan pada nilai-nilai dan keratifan lokal

berbeda dengan tahap awal bagaimana nasionalisme ini tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia pra dan beberapa waktu setelah kemerdekaan, selangannya yang dituangkan Soekarno dalam berbagai kesempatan terutama pada pidato Pancasila 1 Juni 1945.

Pengaruh globalisasi atau lebih tepatnya nilai-nilai kosmopolitanisme menyebarkan kembali akan pentingnya aspek kemanusiaan dari nasionalisme yang mengali timbul karena dominasi negara yang begitu lama terhadap masyarakat sipil di Indonesia. Generasi yang muncul akibat pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah generasi kosmopolit. Mereka berbicara tentang ide-ide kemanusiaan dan hak-hak individu yang tidak memandang batas negara. Bagi mereka nasionalisme jelas bukan dalam pengertian klasik membela negara.

Kalau tidak untuk membela negara lain seperti apakah nasionalisme mereka, atau mereka tidak memiliki nasionalisme lagi. Nasionalisme telah berkembang menjadi sebuah istilah yang berbeda tergantung siapa yang memegangnya. Namun bila dilihat sermangit dan makna nasionalisme awal Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan, nasionalisme ini sangat menghayati nilai-nilai kemanusiaan global. Nasionalisme waktu itu sermangitnya universal dan juga melewati batas-batas negara. Perjuangan kebebasan melawan penindasan dan tuntutan kesederajatan adalah hal yang universal.

Jadi kalau masih ada nasionalisme pada saat ini, maka nasionalisme ini haruslah nasionalisme yang kosmopolit. Dalam nasionalisme kosmopolit, peran Negara dan nasionalisme mengalami transformasi. Negara tidak lagi bisa mengklaim kedaulatan mutlak untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, migrasi dan terorisme misalnya, negara bukan saja harus menyeralikan sebagian kedaulatan untuk bekerjasama dengan dunia internasional tetapi juga memonayem kewajiban untuk mengatasi isu-isu diatas. Dalam konteks ini isu-isu ini dipandang sebagai ancaman global terhadap masa depan umat manusia.

Cara pandang nasionalisme kosmopolit juga bisa dikembangkan untuk mengatasi kegapatan pemerintahan di negara-negara dunia ketiga dalam menciptakan good governance. Institusi internasional bisa membantu bahkan menggantikan sub peran tersebut. Bahkan dalam banyak kasus negara-negara yang kuat sekalipun, negara-negara ini semakin tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Itu berarti siapa opsi lain di luar paper ini yang menarik untuk dibicarakan. Namun

pada intinya kita dapat mengatakan bahwa globalisasi telah mulai beres-tesangan dengan nasionalisme. Dalam hal-hal tertentu, orang tidak mesti hanya pada negosiasi suatu kemanusiaan yang universal kadangkala lebih penting daripada sekedar nasionalisme sempit.

**Daftar Pustaka**

'Mengupas Kedaulatan Individu', *Media Indonesia*, 26 Desember 2003.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983).

Badjehet, Djafar, 'Mengedepankan Islam Substantif' dalam [http://www.pbr.or.id/text\\_isi.php?tab=kolom&nil=Mengedepankan%20Islam%20Substantif&nil1=Mengedepankan%20Islam%20Substantif](http://www.pbr.or.id/text_isi.php?tab=kolom&nil=Mengedepankan%20Islam%20Substantif&nil1=Mengedepankan%20Islam%20Substantif), diakses July 2005.

Baswir, Revisoud, 'Nasionalisme Ekonomi', *Republika*, 2 Juni 2000.

Beitz, Charles, *Political Theory and International Relations* (Princeton NJ: Princeton University Press 1979).

Budinari, Ariel, 'Nasionalisme Rentan Terhadap Manipulasi', wawancara Tempo Interaktif, <http://www.temposinteraktif.com/jurnal/wawancara/waw-ane/budinari01.html>, diakses Juni 2005.

Chatterjee, Partha, 'Whose Imagined Community', dalam Gopal Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (London: Verso, 1993).

Triandafyllidou, Anna, 'National identity and the other', *Ethnic and Racial Studies* 21 (4), 1998.

Smith, A.D., *The Ethnic Revival in the Modern World* (Cambridge University Press, 1981).

Cochran, Molly, 'Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World', dalam John Macmillan and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question. New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995).

Held, David, 'Cosmopolitan Democracy and the New International Order', Cf. *12 Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1997).

Iqbal, Michael, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1995).

Jackson, Robert H., *Quasi-states, sovereignty, international relations, and the Third World* (New York: Cambridge University Press, 1990).

Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993).

Keal, Paul, *Ethics and Foreign Policy* (Canberra: Allen & Unwin and the ANU, 1992).

Kurniawan, 'Dislursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini', [http://www.geocities.com/z\\_izwan/ratapan\\_lisanfat\\_artefak.html](http://www.geocities.com/z_izwan/ratapan_lisanfat_artefak.html), diakses Juni 2005.

Linklater, Andrew, *Men and Citizens in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1990).

Miller, David, *On Nationality* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

Miscic, Nenad, 'Nationalism', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003.

Philpot, Dan, 'Sovereignty', dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/>, diakses 20 Juli 2005.

Salamin, Alfira, 'Barah Nasionalisme Keindonesiaan Putih', *Media Indonesia*, 28 Oktober 2004.

Santoso, Abcepriyadi, 'Hans Petrang? Apa Latar Belakangnya', *Radio Nederland Wereldnieuws*, 10 June 2005.

Shirashi, Takashi, 'Satria vs Pandita', Sebuah Debat dalam Mencari Identitas', dalam Akira Nakazumi (edite), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).

Soekarno, 'Nasionalisme, Islamisme, Marxisme' (Suluh Indonesia Muda, 1926), dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965.

Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, <http://www.jarimatjarah.id/2017/06/kumpulan-pidato-bung-karno-pada-1-juni.html>, diakses 18 Mei 2018.

Soekarno, 'Sekali Lagi Tentang Sosio - Nasionalisme dan Sosio - Demokrasi', dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965.

Samsaji, Jakob, "Nasionalisme Indonesia Baru Perspektif Budaya",  
*Pikiran Rakyat*, 11 Juli 2004.  
Taha, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*,  
Gema Insani Press, 1996.

## Pancasila sebagai Instrumen Penekan Transnasionalisme Ekonomi dan Hukum Internasional

Mirza Satria Buana

### Pendahuluan

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sudah memasuki masa dewasa, 72 tahun pada Agustus 2017 silam, namun usia dewasa Republik belum berunding lurus dengan kemandirian dan independensi negara dalam ranah ekonomi pembangunan khususnya pada sektor investasi internasional. Sebagai Pancasila sebagai ideologi otentik negara telah memberi semacam acuan moral-normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pancasila lewat Sila ke-2 "Persatuan Indonesia" dan Sila ke-5 "Keadilan Sosial" telah memberi ayatat implisit tentang perlunya semangat nasionalisme dan pemenuhan akan keadilan sosial dalam pembangunan.

Pada pidato perayaan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1964 yang diberi judul "Tahan Viper Pericoloso" atau disingkat dengan sebutan Tavip, Presiden Sukarno memberi elaborasi terhadap makna kesaktian nasionalisme Indonesia dengan mengedepankan konsep "Trisakti" yang dibagi dalam tiga idealitas kebangsaan, yakni berdaulat dalam politik, berkeadilan dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Idealitas kebangsaan di atas termanifestasi dalam langkah politik-ekonomi pemerintahan Orde Lama yang mencoba memproteksi sektor-sektor perusahaan negara dan serbuan modal asing, terutama dalam sektor-sektor strategis, seperti telekomunikasi, kereta api, pelayaran dan perhubungan, perbangkutan tenaga listrik, energi dan air minum, pabrik senjata dan mesin, pabrik tenaga atom dan

Tidak ada prediksi yang benar-benar akurat. Begitulah kira-kira yang harus kita pahami terkait prediksi Francis Fukuyama yang begitu yakin Kapitalisme dan Demokrasi versi Barat akan memainkan peran yang dominan dalam aras global pasca runtuhnya Komunisme. Memang selesainya Perang Dingin telah merubah peta politik dunia. Namun ternyata itu hanya sementara. Barat yang terlalu fokus pada Komunisme lupa bahwa ada ideologi-ideologi lain seperti Ideologi Islam (Islamisme) dalam beragam bentuknya yang ternyata mempunyai kekuatan penyeimbang. Islamisme dengan segala kekuatannya terus merasuk ke negara-negara Demokrasi yang masih rentan seperti di Indonesia. Islamisme telah berhadapan-hadapan dengan Pancasila dan terus berebut pengaruh dengan Kapitalisme dan Demokrasi di Nusantara.

Jika selama Perang Dingin Indonesia hanya menjadi figuran, kini harus berjibaku untuk bertahan dari desakan Islamisme dan Kapitalisme. Negara kini bersusah payah untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah hampir dilupakan ditengah pertarungan ideologi-ideologi besar di Indonesia. Segenap elemen bangsa Indonesia tidak pernah menyadari bahwa Pancasila pasti akan masuk dalam pusaran ideologi dunia. Namun sayangnya infrastruktur negara tidak cukup kokoh dalam menopang Pancasila untuk menjadi ideologi yang tangguh melainkan kian hari Pancasila seakan kehilangan maknanya dan menjadi rapuh, tangguh melainkan kian hari Pancasila seakan kehilangan maknanya dan menjadi rapuh. Padahal Pancasila harus terus menghadapi desakan Islamisme melalui jalur politik dan kekerasan dan pada saat yang sama juga berusaha keluar dari pengaruh Kapitalisme.

Buku ini dihadirkan sebagai upaya oleh Universitas Jember, CHRM dan para penulis untuk terus mendiskusikan nilai-nilai Pancasila. Semoga penerbitan buku ini dapat melengkapi referensi para pembaca tentang Pancasila dan dapat memberikan sumbangsih untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

---

**EDITOR :**

- Al Khaniif, S.H., (Universitas Jember), M.A., (Universitas Gadjah Mada), LL.M., (Universitas Lancaster), Ph.D (SOAS Universitas London) adalah Direktur the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember.
- Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., (Universitas Jenderal Soedirman), LL.M. (Universitas Moratuwa), kandidat Doktor (Universitas Radboud) adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Mirza Satria Buana, S.H., (Universitas Lambung Mangkurat), M.H., (Universitas Islam Indonesia), Dr. (T.C. Beirne School of Law Universitas Queensland) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

---

**KONTRIBUTOR :**

Abobakar Eby Hara, Al Khaniif, Baiq Wardhani, Firna Novi Anggoro, Lukman Hakim, Luthfi Widagdo Eddyono, Mahathir Muhammad Iqbal, Mirza Satria Buana, Moh. Irmawan Jauhari, Nuruddin Al Akbar, Paulus Eko Kristianto, Rico Septian Noor, Sadhu Bagas Suratno, Vinensio Dugis.